

ABSTRAK

PELAKSANAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG

Oleh:

RIZKY RAMADHANI

Kabupaten Pandeglang termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap transfer pemerintah Pusat dan Daerah. Data tahun 2024, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 8% dari total pendapatan daerah. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan tambahan atas pajak yang dikenakan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota khususnya atas PKB. Dipungut Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 diharapkan mampu untuk meningkatkan PAD dan mendorong indepedensi fiskal. berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan 1) Bagaimana Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Pandeglang dan 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pandeglang

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Kabupaten Pandeglang dan Kepala Bidang pendapatan Bapenda Kabupaten Pandeglang. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pemanfaatan dan faktor penghambatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan opsen PKB di Kabupaten Pandeglang telah berjalan sesuai ketentuan PP No. 35 Tahun 2023 dengan kontribusi opsen mencapai 43,13 % dari total penerimaan PAD dan mengalami kenaikan sebesar 4,67% dari total DBH PKB Tahun 2024, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan PAD dan 2) Faktor pendukung keberhasilan penerapan opsen meliputi sinergi antara Samsat dan Bapenda melalui *share cost*, *role sharing*, dan perjanjian kerja sama (PKS). Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Secara keseluruhan, opsen PKB terbukti menjadi langkah strategis dalam meningkatkan PAD dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Pandeglang

Kata Kunci: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Indepedensi Fiskal

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MOTOR VEHICLE TAX SURCHARGE AND ITS CONTRIBUTION TO REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN PANDEGLANG REGENCY

By:

Rizky Ramadhani

Pandeglang Regency is categorized as a region with a relatively high level of dependence on transfers from the central and provincial governments. Data from 2024 indicate that locally generated revenue (PAD) contributes only about 8% of the total regional income. The motor vehicle tax surcharge (opsen PKB) is an additional levy imposed by regency or municipal governments specifically on the motor vehicle tax. Collected pursuant to Law No. 1 of 2022, this surcharge is expected to enhance PAD and strengthen fiscal independence. Based on this context, the study formulates two research questions: 1) How is the implementation of the motor vehicle tax surcharge carried out, and what is its contribution to PAD in Pandeglang Regency? and 2) What supporting and inhibiting factors affect the implementation of the surcharge in Pandeglang Regency?.

This research applies both normative and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Administration Subdivision of the Pandeglang Samsat Office and the Head of the Revenue Division of the Pandeglang Regional Revenue Agency (Bapenda). The data were analyzed qualitatively to provide an in-depth description of the implementation and its constraints.

The findings reveal that (1) the implementation of the motor vehicle tax surcharge in Pandeglang Regency has been carried out in accordance with Government Regulation No. 35 of 2023, with the surcharge contributing 43.13% of total PAD revenue and increasing by 4.67% from the 2024 PKB revenue-sharing funds (DBH PKB), thereby positively influencing PAD growth; and 2) supporting factors include strong collaboration between the Samsat Office and Bapenda through cost-sharing, role-sharing, and formal cooperation agreements. The primary inhibiting factor is the low tax compliance among vehicle owners. Overall, the surcharge mechanism has proven to be a strategic instrument for increasing PAD and promoting fiscal independence in Pandeglang Regency.

Keywords: Motor Vehicle Tax Levy, Local Own-Source Revenue, Fiscal Independence